

## **Peran Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dalam Menarik Investasi Asing di Kota Batam**

**M. Syuzairi<sup>1</sup>, Yustika Anggitarius<sup>2</sup>, Abdul Djalal<sup>3</sup>, Bunga Paramita<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang,  
Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia

**ABSTRAK :** Investasi merupakan factor penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara dikarenakan mampu meningkatkan kualitas produksi serta mampu menciptakan dan meyerap tenaga kerja. Penelitian ini membahas mengenai peran BP Batam dalam mengembangkan nilai investasi melalui kegiatan promosi. Kegiatan Promosi yang dilakukan merupakan bentuk Diplomasi Publik. Diplomasi Publik adalah bentuk dari praktik memperkenalkan dan memasarkan suatu sumberdaya guna mencapai tujuan kepentingan Nasional. Dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa BP Batam dalam melaksanakan perannya mempromosikan Batam sebagai kawasan target investasi melalui diplomasi public sudah berperan dengan baik, Namun Hasil yang diterima belum bisa dikatan berhasil dikarenakan Batam belum mampu untuk bersaing dengan Kawasan khusus di negara lain dikarenakan masih banyak menghadapi kendala yang menjadi tugas rumahan tiap tahunnya.  
Kata Kunci : Investasi Asing; Diplomasi Publik; Promosi

**ABSTRACT :** Investment is an important factor in a country's economic growth because it is able to improve the quality of production and is able to create and absorb labor. This research discusses the role of BP Batam in developing investment value through promotional activities. Promotional activities carried out are a form of Public Diplomacy. Public Diplomacy is a form of the practice of introducing and marketing a resource to achieve the objectives of the National interest. In this study, it was found that BP Batam in carrying out its role in promoting Batam as an investment target area through public diplomacy has played a good role, but the results received have not been able to be successfully categorized because Batam has not been able to compete with special areas in other countries because there are still many obstacles that become home tasks every year.

*Keywords : Foreign Investment; Public Diplomacy; Promotion*

Email : [msyuzairi@umrah.ac.id](mailto:msyuzairi@umrah.ac.id), [yustika@gmail.com](mailto:yustika@gmail.com), [abduljalal597@gmail.com](mailto:abduljalal597@gmail.com),  
[bungaparamita1@umrah.ac.id](mailto:bungaparamita1@umrah.ac.id)

## I. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Percepatan investasi asing sebuah negara menjadi sangat penting dalam sektor penanaman modal, karena kegiatan ini mampu menciptakan investasi yang dapat menambah stok modal (*capital stock*). Meningkatnya stok modal yang ada juga mampu meningkatkan produktivitas, jumlah, dan kualitas modal yang nantinya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mampu menyerap tenaga kerja yang dimiliki.

Pemercepatan pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menyerap tenaga kerja. Dengan terserapnya tenaga kerja mampu mengurangi pengangguran, kesejahteraan masyarakat meningkat. Investasi juga memungkinkan adanya pertukaran teknologi dan ilmu pengetahuan ke negara berkembang oleh negara maju.

Pendapatan nasional adalah salah satu tolak ukur penempatan sumberdaya yang efektif. Kapasitas pendapatan nasional yang mampu dihasilkan menggambarkan seberapa efisien sumberdaya yang ada (meliputi tenaga kerja dan modal). Sumberdaya tersebut juga dipergunakan sebagai alat ukur kekayaan suatu negara yang adalah pendapatan nasional per kapita, sedangkan alat ukur efisiensi adalah pendapatan per tenaga kerja.

Kawasan Perdagangan Bebas khususnya di Provinsi Kepulauan Riau yang diharapkan dapat membentuk iklim investasi yang ideal serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penanam modal asing dan membantu mengembangkan perekonomian. Dalam PP No 46, 47, 48 Tahun 2007 menetapkan 3 wilayah Kawasan Perdagangan Bebas dan

Pelabuhan Bebas (KPBPB) yaitu wilayah KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun. Dari ketiga KPBPB yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah diatas KPBPB Batam merupakan penyumbang investasi terbesar di provinsi kepulauan riau (Perkembangan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing Provinsi Kepulauan Riau 2014, 2015,2016,2017,2018).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34/1984, Batam pada awalnya hanya terdiri dari 3 kecamatan Belakang Padang, Batam Barat dan Batam Timur, melalui terbitnya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 diperluaslah kecamatan di Pulau Batam menjadi 12 kecamatan yaitu, Belakang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Bulang, Galang, Batam Kota, Sagulung, Sei Beduk, Nongsa, Lubuk Baja, Bengkong, Batuaji.

Batam pada awalnya berstatus kota administrative, yang kemudian diubah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53/1999 dan diubah melalui Undang-Undang No 13/2000 menjadi status Daerah Otonom Kota Batam. Dengan adanya perubahan yang terjadi berpengaruh terhadap perkembangannya terutama mengenai tata kelola pemerintahan yang mana menyangkut dua lembaga yaitu Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Sejak berlakunya UU Otonomi Daerah Nomor 33 Tahun 1999. Otorita Batam pun saat itu pun harus menyerahkan sebagian kewenangan mereka kepada Pemerintah Kota Batam. Kemudian lewat PP Nomor 46 Tahun 2007 Otorita Batam diubah menjadi Badan Pengusahaan (BP) Batam yang berada di bawah Dewan Kawasan Pusat Batam yang diketuai Darmin Nasution menteri perekonomian.

Pengelolaan Batam, yang merupakan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, saat ini tidak lagi memiliki otoritas penuh dari Badan Pengusahaan Batam. Batam telah berkembang menjadi daerah administratif yang memungkinkan bercampurnya peran Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat (melalui kementerian/lembaga), dan Badan Pengelola Kawasan (yang berada dibawah Dewan Kawasan yang formaturnya adalah Pemerintah Daerah dan instansi vertikal Pusat di Daerah).

Pengelolaan yang tidak satu atap atau adanya pengelolaan oleh berbagai pihak tersebut, menyebabkan pengembangan kawasan Batam menjadi tidak berfokus pada tujuan awal pembentukan kawasan, yaitu pemasukan devisa hasil ekspor yang signifikan, berkembangnya industri sehingga membuka lapangan kerja seluas-luasnya, meningkatkan penanaman modal asing maupun domestik dengan perusahaan baru yang terus tumbuh, dan meningkatkan arus wisatawan akibat berkembangnya ekonomi kreatif dan industri pariwisata. Hal ini tercermin melalui surplusnya neraca perdagangan yang relatif stagnan, jumlah penduduk yang terus tumbuh sementara angkatan kerja yang terus menurun, pertumbuhan sektor perdagangan dan bangunan yang lebih tinggi dari pada sektor industri, dan industri pariwisata yang berbasis pada barang konsumtif. Kondisi tersebut menimbulkan kompleksitas, karena perekonomian Batam dibentuk oleh insentif fiskal Pemerintah memberikan intensitif tersebut berupa pembebasan pajak, bea dan cukai. Sehingga seharusnya diharapkan terdapat hubungan langsung antara investasi Pemerintah berupa belanja negara dari APBN/APBD dan oportunitas hilangnya pendapatan negara, terhadap

kinerja struktur ekonomi kawasan yang berkembang ke arah penguatan sektor industri berbasis ekspor.

Permasalahan kelembagaan tersebut membentuk keterbatasan pengembangan ekonomi Batam, dimana BP Batam yang seharusnya memiliki peran sebagai organisasi berbasis bisnis dengan tujuan pengembangan ekonomi Batam hanya menjadi Lembaga konvensional yang hanya bersifat administrative dan pelayanan public.

BP Batam sendiri merupakan badan yang bekerja langsung dibawah kendali Menko Perekonomian selaku Ketua Dewan Kawasan Nasional untuk mengatur pelayanan perizinan penanaman modal asing di Batam. Hal ini dimaksud untuk dapat memajukan penanaman modal khususnya asing

Dalam mengembangkan Investasi BP Batam yang memiliki wewenang penuh dalam pengelolaan ekonomi di Pulau Batam untuk menarik peminat dalam menanamkan modal dengan adanya pasar bebas/*global* seharusnya dapat menjalankan perannya sebagai aktor negara dikarenakan target pemerintah adalah para investor penanam modal asing, lantas langkah yang perlu diambil selain melakukan promosi adalah dengan melakukan diplomasi dimana dalam hal ini diplomasi yang ditujukan bukan hanya sekedar antarpemerintah negara melainkan *Stakeholder* non pemerintah seperti pihak swasta, dan para investor.

**Tabel 1.1 Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Asing di Kepulauan Riau**

No	Tahun	Jumlah	
		Proyek	Investasi (juta US\$)
1	2014	128	392.100.000
2	2015	594	640.400.000
3	2016	880	519.100.000
4	2017	812	103.100.000
5	2018	804	813.248.000
6	2019 (Q1)	399	454.867.000

Sumber: Publikasi Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Berdasarkan data Publikasi Badan Koordinasi Penanaman Modal dimana pada tahun 2014 menuju 2015 Provinsi Kepulauan Riau mengalami kenaikan dengan sangat besar jumlah proyek dari 128 proyek menjadi 594 proyek dan jumlah ini berbanding lurus dengan jumlah investasi dimana investasi pada tahun 2014 sebesar 392.100.000 USD mengalami kenaikan hingga mencapai 640.400.000 USD hal ini menjadi angin segar dalam perkembangan investasi di Kepulauan Riau sendiri. Memasuki tahun 2015 mengalami kenaikan terbesar dimana berada di angka 880 proyek namun tidak berbanding lurus bahkan berbanding terbalik jumlah investasi Kepulauan Riau pada tahun 2015 hanya berada di angka 519.100.000 USD hal ini masih menjadi akar dan awal dari polemik yang seharusnya ketika banyaknya proyek diharapkan berbanding lurus dengan jumlah investasi yang di dapat. Beralih ke tahun selanjutnya 2017 jumlah proyek mengalami penurunan namun tidak signifikan yaitu sebesar 812 dan begitu pula dengan jumlah investasi mengalami penurunan yang mencapai 103.100.000 USD hal ini juga sangat signifikan

penurunannya dimana penurunan yang terjadi merupakan penurunan yang sangat tinggi, hal ini mulai menimbulkan banyaknya perusahaan perusahaan yang pindah dan bahkan tutup dikarenakan permasalahan yang dihadapi oleh Pulau Batam khususnya, kemudian di tahun 2018 jumlah proyek juga mengalami penurunan namun masih berada di angka 804 proyek, kabar gembira datang dari jumlah investasi yang mengalami inflasi mencapai 813.248.000 USD hal ini merupakan kabar yang menggembirakan dan menjadi angin yang segar bagi sektor investasi dimana sudah mulai adanya kebangkitan ekonomi khususnya sektor investasi di Kepulauan Riau, dan di tahun 2019 sendiri masih memasuki triwulan pertama dimana proyek dan jumlah investasi kembali mengalami penurunan yang cukup drastis dimana jumlah proyek berada hanya di angka 399 proyek dan jumlah investasi hanya berada di angka 454.867.000 USD hal ini menimbulkan pertanyaan apa yang menjadi penyebab dari menurunnya kondisi dan ketidakstabilan iklim investasi di Kepulauan Riau, atau apa penyebab dari berkurangnya minat para investor asing dalam menanamkan modalnya di Indonesia khususnya di Pulau Batam.

Dalam hal ini penulis menemukan permasalahan Mengapa Pulau Batam masih belum bisa berkembang dan menjadi mangsa pasar penanaman modal asing dan mengacu pada perkembangan investasi di pulau Batamyang dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menurun (Kepulauan Riau dalam Angka tahun 2014-2019). Permasalahan yang muncul mendorong penelitian ini untuk mengangkat permasalahan sebagai berikut *Bagaimana Peran BP Batam Dalam Menarik Investasi Asing di Kota Batam.*

## II. METODE PENELITIAN

### 2.1 Pendekatan Penelitian

Menurut Mathew & Michael Huberman Penelitian kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlandaskan kokoh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkungan setempat. Kualitatif merupakan wujud kata-kata dari deretan angka serta dapat membimbing kita untuk memperoleh penemuan-penemuan yang tidak diduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka teoretis baru. (Mathew & Michael Huberman, 2014)

Penelitian Deskriptif menggambarkan perilaku, pemikiran, atau perasaan suatu kelompok atau individu. Contoh umum dari penelitian deskriptif adalah jajak pendapat, yang menggambarkan sikap suatu kelompok orang. Dalam Penelitian Deskriptif, peneliti kecil upayanya untuk menghubungkan perilaku yang diteliti dengan variabel lainnya ataupun menguji atau menjelaskan penyebab sistematisnya. Seperti namanya, Penelitian Deskriptif hanya mendeskripsikan.

Tujuan Penelitian Deskriptif adalah menggambarkan karakteristik atau perilaku suatu populasi dengan cara yang sistematis dan akurat. Biasanya, Penelitian Deskriptif tidak didesain untuk menguji Hipotesis, tetapi lebih pada upaya menyediakan informasi seputar karakter fisik, sosial, perilaku, ekonomi, atau psikologi dari sekelompok orang.

### 2.2 Objek dan Lokasi Penelitian

Objek yang peneliti ambil tidak lain adalah Badan Pengusahaan Batam yang mengelola perusahaan pertumbuhan ekonomi di Pulau Batam, dikarenakan BP Batam adalah Lembaga yang memiliki

kewenangan dalam urusan pengelolaan ekonomi di Pulau Batam dan Lokasi yang peneliti ambil adalah di Kantor Badan Pengusahaan Batam dengan alasan untuk mendapatkan informasi dan data yang lebih efisien.

### 2.3 Fokus Penelitian

Menjadi fokus dari penelitian ini adalah bagaimana upaya atau langkah diplomasi dan strategi yang diambil oleh BP Batam dalam mengembangkan Investasi di Pulau Batam agar mampu bersaing di Kawasan Asia Tenggara.

### 2.4 Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan berasal dari Data Primer dan sekunder, dimana data primer yang dimaksud melalui wawancara, data statistic dalam hal ini menggunakan data statistic yang berasal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPN) yang diperlukan, Badan Pengusahaan Batam dan lain-lain. Data Sekunder berupa Berita-berita dan literasi baik dari media cetak ataupun media online.

### 2.5 Teknik Pengumpulan Data

#### 2.5.1 Wawancara Telaah Pustaka

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis adalah telaah pustaka (library research) yaitu pengumpulan data dengan menelaah sejumlah literatur baik berupa buku-buku, jurnal, dokumen, surat kabar, makalah dan artikel yang berkaitan dengan masalah tersebut.

#### 2.5.2 Wawancara

Menurut Dwiastuti (2017:196) wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data primer yang menggunakan instrument kuesioner atau daftar pertanyaan. Pada metode ini terjadi proses komunikasi secara

langsung antara enumerator atau interviewer (petugas yang melaksanakan wawancara atau pewawancara) dengan responden (sumber data).

### 2.6 Informan

Informan dapat diartikan sebagai narasumber yang memberikan informasi melalui metode wawancara. Informan disini tentunya adalah orang yang sudah berpengalaman bekerja di BP Batam

## III. Hasil dan Pembahasan

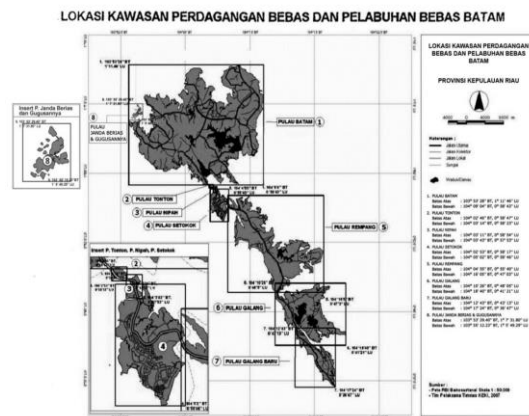
### Deskripsi Objek dan Lokasi Penelitian

#### 3.1 Pulau Batam Sebagai Kawasan Investasi

Pulau Batam sebagai kawasan investasi merupakan rancangan yang sedari awal sudah dibentuk untuk dikembangkan kedepannya menjadi salah satu sentra industry di Indonesia. Batam sendiri berada di Kawasan yang sangat strategis yang menjadikannya potensial dan menarik dikalangan investor. Dengan berbagai keunikan yang dimiliki menjadikan Batam berkembang selaras dengan persaingan global dengan negara tetangga di Asia tenggara sendiri.

Batam memiliki luas wilayah keseluruhan mencapai 1.575 km<sup>2</sup> dengan luas wilayah daratan seluas 715 km<sup>2</sup>. Melihat perkembangannya dimana dari awal berdirinya Batam dihuni hanya 6.000 jiwa dan bertumbuh hingga mencapai angka 1.236.399 jiwa. Dengan pertumbuhan jumlah penduduk yang linear dengan perekonomian Batam juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan ekonomi yang pesat pemerintah Batam pun menyelaraskan pertumbuhan pembangunan di Pulau Batam, mulai dibangunnya fasilitas seperti jalan, bandara, Pelabuhan yang memadai

guna membantu perkembangan daerah Kawasan. Dalam system perkotaan nasional Batam masuk kedalam kategori Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Batam juga masuk kedalam Kawasan Strategis Nasional bersamaan dengan Kawasan Bintan dan Karimun yang mana Kawasan ini sebagai Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas. Dikembangkannya Kawasan Strategis Nasional Batam, Bintan,



Gambar 4.1 Kawasan lingkup KPBPB Batam  
 Sumber : Peraturan Pemerintah Republik

Karimun (KSN BBK) ini dengan tujuan meningkatkan kualitas dan daya Tarik investasi dan Kerjasama regional IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura – Growth Triangle).

### **3.2 Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam**

Dalam Peraturan Pemerintah No. 34/1984, Batam pada awalnya hanya terdiri dari 3 kecamatan, Belakang Padang, Batam Barat dan Batam Timur, kemudian diperluas menjadi 12 kecamatan, Belakang Padang, Batu Ampar, Sekupang, Bulang, Galang, Batam Kota, Sagulung, Sei Beduk, Nongsa, Lubuk Baja, Bengkong, Batuaji.

Batam pada awalnya berstatus kota administrative, yang kemudian diubah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53/1999 dan diubah melalui Undang-Undang No 13/2000 menjadi status Daerah Otonom Kota Batam. Dengan adanya perubahan yang terjadi berpengaruh terhadap perkembangannya terutama mengenai tata kelola pemerintahan yang mana menyangkut dua lembaga yaitu Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Awalnya berdirinya Pulau Batam dibentuk untuk fokus menjadi pangkalan logistik dan operasional yang berhubungan mengenai eksplorasi dan eksploitasi minyak lepas pantai Perusahaan Negara Pertamina. Pada tahun 1960-an, Batam berhasil menjadi basis logistik minyak bumi tepatnya di Pulau Sambu. Letaknya yang strategis yaitu berhadapan langsung dengan Singapura dan Johor Malaysia, menjadikan pulau ini memiliki keunggulan dibandingkan pulau lain. Dengan kelebihan tersebut pada, tahun

1970 an, pada masa pemerintahan Soeharto memutuskan menjadikan Batam sebagai pusat industri agar dapat bersaing dengan negara tetangga, khususnya Singapura. Untuk mempercepat pembangunan di Batam, pemerintah melalui Keputusan Presiden yaitu Keppres Nomor 41 Tahun 1973 membentuk Badan Otorita Industri Pulau Batam (Otorita Batam). Otorita Batam adalah lembaga pemerintah yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pembangunan Pulau Batam.

Kemudian lewat PP Nomor 46 Tahun 2007 Otorita Batam diubah menjadi Badan Pengusahaan (BP) Batam yang berada di bawah Dewan Kawasan Pusat Batam, yang diketuai Darmin Nasution menteri perekonomian. BP Batam sendiri merupakan badan yang bekerja langsung dibawah Kementerian Perdagangan untuk mengatur pelayanan perizinan penanaman modal asing di Batam. Hal ini dimaksud untuk dapat memajukan penanaman modal khususnya asing

Langkah tersebut dilakukan pemerintah karena pada saat itu Batam masih sebuah kecamatan di bawah Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Riau. Terbukti keputusan yang diambil pemerintah ini tepat. Dengan segala keistimewaan yang diberikan pemerintah pusat saat itu, dalam waktu yang sangat singkat Batam berubah menjadi daerah industri yang maju dan menjadi salah satu tujuan investasi investor mancanegara. Puncaknya terjadi sekitar tahun 1980 an hingga awal tahun 1990 an. Saat itu nama Batam begitu baik dan diminati oleh arus pendatang terutama yang mencari kerja pun melonjak tajam.

Akibat keberhasilan dan nama Batam yang sangat prestisius pemerintah pusat tidak

dengan mudah memilih akan memberikan pengelolaan tersebut ke sembarang orang nama nama yang muncul mulai dari Ibnu Sutowo yang waktu itu menjabat sebagai Dirut Pertamina. Kemudian Prof JB Sumarlin, Prof DR BJ Habibie, JE Habibie, dan Ismeth Abdullah dicanangkan untuk menjadi Kepala Otorita Batam saat itu.

Namun kewenangan Otorita Batam mulai berubah sejak berlakunya UU Otonomi Daerah Nomor 33 Tahun 1999. Otorita Batam pun saat itu pun harus menyerahkan sebagian kewenangan mereka kepada Pemerintah Kota Batam.

### **1. Tugas, Fungsi, dan Wewenang**

- a. Tugas Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tugas Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 tahun 2007 adalah “Melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam”
- b. Fungsi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Fungsi Badan pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas tertera dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang berbunyi “: Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas mempunyai fungsi sebagai tempat untuk mengembangkan usaha-usaha di bidang perdagangan, jasa, industry, pertambangan dan energy, transportasi, maritime, dan perikanan, pos, dan telekomunikasi,

perbankan, asuransi, pariwisata, dan bidang-bidang lainnya” Adapun Fungsi Badan pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Batam sendiri memiliki 9 (sembilan) Fungsi pokok yaitu Perumusan dan/atau penetapan kebijakan di bidang pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di Kawasan Bebas Batam Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan, pengembangan dan pembangunan di Kawasan Bebas Batam. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pembinaan administrasi dan aparatur Pelaksanaan pengelolaan kegiatan penanaman modal Pelaksanaan kegiatan lalu lintas barang Pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana Pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana perhubungan laut dan udara Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Pengusahaan Batam

- c. Wewenang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Melalui Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam memiliki kewenangan dalam hal pengelolaan, pengembangan dan pembangunan Kawasan serta menjamin kegiatan usaha di bidang perekonomian yang meliputi perdagangan, maritim, industry, perhubungan, perbankan, pariwisata, dan bidang-bidang lainnya dalam Kawasan.



## 2. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran 8.

### A. Visi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Visi dari Badan Pengusahaan Batam adalah

“Berkontribusi bagi peningkatan investasi untuk mewujudkan visi Presiden dan Wakil Presiden, Indonesia maju yang berdaulat,

### 2.7.3 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengusahaan Batam

Sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2000 dimana BP Batam melakukan pengelolaan dan pengembangan KPBPB-Batam diarahkan untuk tidak hanya berfokus pada pengembangan ekonomi Kawasan tetapi menjadi contributor pembangunan ekonomi nasional dengan mempertimbangkan perkembangan wilayah dan investasi. Dalam pengembangan Kawasan dan Investasi arah kebijakan yang diatur mengacu pada

1. Melaksanakan Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta kerjasama dalam pelaksanaan pengembangan dan pembangunan KPBPB Batam.
2. Melaksanakan Peningkatan kapabilitas aparatur/ SDM BP Batam yang berkompeten.
3. Peningkatan kapabilitas aparatur/ SDM BP Batam melalui Pendidikan, pelatihan dan bimbingan teknis.
4. Melaksanakan system pelayanan berbasis teknologi informasi dalam hal perizinan investasi.
5. Membuat *database* berupa big data di Batam.
6. Menciptakan pola *marketing mix* yang berfokus pada bidang prioritas.
7. Menciptakan pola bisnis yang sehat dengan memanfaatkan segala asset yang dimiliki.

Melaksanakan pembangunan yang berstandar internasional dan berwawasan lingkungan yang berpacu pada rencana induk.

Mengacu kepada Rencana StrategiS Badan Pengusahaan Batam tahun 2020-2024 yang mana merupakan upaya tindak lanjut dari RPJPN 2004-2024. Renstra BP Batam disusun dengan harapan guna mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pengembangan Kawasan Bata, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

Dalam perkembangannya Teori diplomasi public tidak lepas dari tiga aspek yaitu kepentingan nasional, actor negara dan non-negara, teknologi dan media komunikasi. Diplomasi Publik muncul diawak pasca perang dunia 1 dimana terjadinya pergeseran prinsip dalam praktik diplomasi, yang dimana actor utama diplomasi didominasi oleh pemerintah yang berdaulat, seiring pergeseran tren dalam politik luar negri menjadikan diplomasi publik sebagai instrument baru yang lebih ramah dan variable. Diplomasi public yang sekarang menjadi praktik dari *soft politic* memunculkan actor-aktor diluar negara.

BP Batam yang merupakan representasi dari pemerintah pusat dalam upaya mengembangkan ekonomi melalui investasi asing mencoba menjadi actor yang berperan dalam *soft politik* dalam kasus ini melaksanakan perannya melalui kegiatan promosi. Kegiatan promosi pun dilakukan tidak hanya dilakukan secara diplomatic dengan pemerintah namun juga dengan actor bisnis seperti perusahaan-perusahaan target investasi. Hal ini menggambarkan bahwa dalam pelaksanaannya setiap actor memiliki peran dan tujuannya tertentu.

Diplomasi Publik diharapkan mampu membuka jaringan yang lebih luas antar pelaku ekonomi. Dengan tujuan memberikan informasi yang cukup, menunjukkan eksistensi melalui *power* yang dapat ditunjukkan dengan sumberdaya yang dimiliki, memperkenalkan gambaran mengenai kepentingan negara kepada actor internasional baik pemerintah maupun non-pemerintah, mewujudkan tujuan kepentingan nasional negara asal sehingga mampu membangun Kerjasama dengan melalui bisnis khususnya penanaman modal asing.

BP Batam dalam praktiknya sudah melakukan tujuan-tujuan dari diplomasi public tersebut dengan baik disamping hasil yang masih menyusul untuk dapat dirasakan secara instan.

#### **IV. Kesimpulan**

BP Batam dengan peran sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di bawah Menko Perekonomian diberikan

Perhatian yang lebih. Insentif dan regulasi yang diberikan guna mempermudah upaya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara membutuhkan dukungan dari berbagai pelaku ekonomi selain pemerintah dalam hal menarik investasi asing. Penanaman modal asing atau yang disebut investasi akan dapat diwujudkan apabila ada jaringan yang kuat dan kepercayaan investor terhadap negara tujuan investasi.

Dalam perwujudan pertumbuhan investasi BP Batam sudah melakukan perannya dengan baik. Namun belum cukup untuk dapat membawa kota Batam bersaing dengan kawasan pesaing seperti Johor dan Vietnam. Namun dalam perkembangannya tidak dipungkiri dengan umur yang sudah 40 tahun perkembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dapat dikatakan stagnan atau bergerak sangat lambat tertinggal jauh dengan para pesaingnya khusus Johor dan Vietnam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. (2013). Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. In *Research design*.
- Drinkwater, D. (2005). Sir Harold Nicolson and International Relations: The Practitioner as Theorist. In *Sir Harold Nicolson and International Relations: The Practitioner as Theorist*.  
<https://doi.org/10.1093/0199273855.001.0001>
- Satow, E. (2011). A guide to diplomatic practice. In *A Guide to Diplomatic Practice*.  
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511995194>
- Noor, Juliansyah. 2011. *METODOLOGI PENELITIAN: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: KENCANA
- Siyoto, Sandu. Sodik, M. Ali. 2015. *DASAR METODOLOGI PENELITIAN*. Yogyakarta: Literasi Media Publishi
- Mankiw, N. G. (2000). *Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, N. G. (2003). *Pengantar Ekonomi Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Shoelhi, M. (2001). *DIPLOMASI: Praktik Komunikasi Internasional*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Suparmoko, M., & Irawan. (2002). *Ekonomi pembangunan - 4/E*. Yogyakarta: BPFE.
- Todaro, M. P. (2000). *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga: jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Krugman, P., & Obstfeld, M. (1991). *Ekonomi Internasional : Teori dan Kebijakan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Muzwardi, Ady. 2016. *Analisis Hubungan Antar Organisasi dalam Pengembangan Investasi di Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam*. Jurnal Pemerintahan dan Administrasi Publik: Vol 9 (1)
- Hennida, C. (2010). *Diplomasi publik dalam politik luar negeri*. Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, 22(1), 17-23.
- Zaenuddin, Muhammad, 2009. *MOTIVASI DAN KENDALA INVESTASI DI BATAM*, Jurnal Politeknik Negeri Batam: Vol 1 (1)
- Manik, Tumpal; Hery, Eryanto; Lia, Suprihartini, 2016. *PENGEMBANGAN INVESTASI WILAYAH PERBATASAN, INDUSTRI MARITIM DAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PESISIR DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU*, Jurnal Ekonomi Maritim Indonesia: Vol 7 (2)